

**IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMANTAUAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KELURAHAN PANTAI JOHOR, KECAMATAN DATUK BANDAR,
KOTA TANJUNG BALAI**

Oleh:

Junawan, SE, M.Si

Sumardi Adiman, SE, Ak., M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

The objective of the research was to identify the development needs of the Management Information System Monitoring the Payment of Land and Building Taxes (PBB) in Datuk Bandar Subdistrict, Tanjung Balai City, and whether the system will increase knowledge, and awareness in paying PBB tax debt in a timely manner. The sampling technique used in this study uses the accidental sampling method with totaling 50 taxpayers. The analytical method uses descriptive analysis and data collection using a questionnaire. The results showed that the collection of PBB still use an inefficient manual system, and the unavailability of a database that updates the PBB taxpayer for payment of land and building tax obligations, so it is necessary to build a Website-Based Information System for Monitoring Land and Building Tax Payments that has database separately in the Datuk Bandar Village Head Office. The majority of PBB taxpayers in Pantai Johor Village agree and strongly agree with the average percentage above 80%, that it is very necessary to build a Management Information System Monitoring the Payment of Land and Building Taxes so that the submission of Land and Building Tax collection is more effective and efficient and timely, so that taxpayer awareness and participation in PBB payments

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang intensif melakukan pembangunan di segala aspek, terutama dalam hal infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan perekonomian masyarakat, seperti Jalan Raya, Jembatan, Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara dan yang lainnya. Pembangunan ini tentunya tidak akan berhasil dengan maksimal tanpa adanya ketersediaan anggaran dana yang cukup yang harus disediakan oleh pemerintah yang didominasi dari pendapatan pajak hingga mencapai 85%. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah kita karena masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, yaitu dengan mengintensifkan edukasi, dan penyuluhan, serta pendampingan untuk peningkatan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Jika kedua belah pihak, masyarakat dan

pemerintah dapat saling mendukung, maka tentunya penerimaan Negara dapat dioptimalkan, sehingga kesejahteraan seluruh masyarakat dapat segera tercapai.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberikan rakyat kepada Negara dimana tata cara pelaksanaannya diatur dalam undang-undang, yang mana atas pembayaran tersebut wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung, dan dana dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No.6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2000. Berlakunya undang-undang tersebut, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assessment System, yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri, dan Wajib pajak aktif untuk menyelesaikan administrasi perpajakannya, sedangkan pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

Namun fakta dilapangan memperlihatkan bahwa Self Assessment System ini belum berjalan dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh besarnya nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak yang beragam khususnya di pedesaan, serta ditambah lagi opini yang berkembang di sebagian masyarakat atas ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak yang disebabkan oleh masih banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana pajak, dan meningkatkan pelayanan dalam penyelesaian administrasi perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka akan lebih baik dilakukan pendataan kembali baik Objek dan Subjek Pajak PBB, serta pemantauan yang lebih intensif dan lebih aktif terhadap penyelesaian pembayaran PBB tersebut, khususnya di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai.

Pada dasarnya PBB menggunakan dua sistem pemungutan yaitu official assesmet system dan self assesment system, yang mana kedua sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu self assesment system diterapkan dalam kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), sedangkan official assesment system diterapkan dalam penentuan besarnya PBB. PBB dibayar 1 tahun sekali, walaupun dibayar 1 tahun sekali tidak semua wajib pajak dapat membayar pajaknya tepat pada waktunya sehingga realisasi penerimaan PBB tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini dikarenakan waktu pembayaran PBB tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi keuangan wajib pajak. Selain itu kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang tidak membayar PBB maka akan mendapat Surat Tagihan PBB (STP PBB) dan batas waktu pelunasan STP selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sejak STP diterima wajib pajak.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah membuat berbagai terobosan dalam pembayaran PBB, yaitu sistem pembayaran manual dan sistem elektronik (online system). Sistem pembayaran manual dapat dilakukan di Bank atau Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran yang tercantum pada SPPT, atau petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. Pembayaran menggunakan sistem elektronik dapat dilakukan di ATM, Internet Banking, dan SMS banking.

Walaupun sudah tersedia sistem pembayaran secara elektronik, yang seharusnya semakin memudahkan dalam pembayaran PBB, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak PBBnya, hal ini mungkin dikarenakan kurangnya pengawasan secara aktif mengingatkan atas kewajibannya dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan yang masih terutang. Untuk memberikan solusi atas masalah ini maka perlu dilakukan penelusuran, indentifikasi atas kebutuhan suatu sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data wajib pajak yang sudah membayar dan yang masih terutang PBB, dan memberikan remainder secara otomatis melalui suatu server yang dapat mengirimkan pesan ke handphone setiap wajib pajak. Setelah adanya penambahan Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan ini diharapkan wajib pajak dapat membayar PBB dengan tepat waktu, sehingga tidak terjadi penunggakan dan penerimaan dari PBB di Kecamatan Datauk Bandar, Kota Tanjung Balai mengalami peningkatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai sangat dibutuhkan?
2. Apakah pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai akan menambah pengetahuan, dan kesadaran dalam membayar hutang pajak PBB dengan tepat waktu?

II. LANDASAN TEORI

A. Identifikasi

Lorens Bagus (2005) mengatakan bahwa “identifikasi adalah mengakui atau menentukan keadaan sesuatu atau bahwa seseorang itu apa adanya”, dan menurut JP. Chaplin yang diterjemahkan oleh Kartini Kartono (1999) mengemukakan bahwa “identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan ciri karakteristik tertentu.”

Jogiyanto (2007) Mengemukakan bahwa, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Sistem merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Sistem terdiri dari unsur yang dapat dikenal, saling melengkapi karena satu maksud, tujuan dan sasaran. Menurut Mulyadi (2001) “Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.”

B. Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi penerimanya dan bertujuan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan. Berikut adalah beberapa definisi informasi yang dikemukakan oleh Menurut Barry E. Cushing dalam Wahyono (2004), informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya.

C. Manajemen

Menurut Terry (2000), Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Ditinjau dari segi fungsinya, manajemen memiliki 4 fungsi dasar yang menggambarkan proses manajemen, semuanya terangkum sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan melibatkan urusan memilih tugas yang harus dilakukan untuk mempertahankan tujuan organisasi, menjelaskan bagaimana tugas harus dilaksanakan, dan memberi indikasi kapan harus dikerjakan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yakni memberi tugas sebagai hasil dari tahapan perencanaan, tugas tersebut diberikan kepada beragam individu atau grup di dalam organisasi. Mengorganisir adalah untuk menciptakan mekanisme untuk menjalankan rencana.

3. Pengaruh

Pengaruh merupakan sebuah motivasi, kepemimpinan atau arah. Pengaruh dapat didefinisikan sebagai bimbingan dari aktivitas dari anggota organisasi dalam arah yang dapat membantu organisasi lebih terarah untuk mencapai hasil atau target.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan sejumlah peranan yang dimainkan oleh para menejer.

D. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen menurut Jogiyanto (2005), adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang SIM antara lain :

1. Proses Manajemen, seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya.
2. Proses Pengembangan, seperti manajemen proyek pengembangan sistem, dan seterusnya.
3. Konsep Pengembangan, seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya.
4. Representasi, seperti sistem basis data, pengkodean program, dan seterusnya.
5. Sistem Aplikasi, seperti Knowledge Management, Executive System, dan seterusnya.

E. Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Materi penelitian ini disusun dengan mempelajari literatur yang berkenaan dengan judul penelitian ini, berupa data data serta penelitian penelitian yang menyangkut persepsi wajib pajak PBB akan pentingnya dibuat sistem manajemen pemantauan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Data dan literature yang digunakan berasal pengambilan langsung dari Kantor Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dan juga berbasis dari internet serta bahan-bahan dari perpustakaan. Literatur yang dijadikan acuan tidak hanya media cetak berupa buku tetapi juga media elektronik, dan data penelitian.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

1. Tahap pendahuluan dilakukan dengan mempelajari tata cara pemungutan PBB, dan kemudian melihat dampak masalah perpajakan yang ditimbulkan, selanjutnya pengumpulan data, kemudian diketahui fenomena dalam penelitian.
2. Tahap kedua adalah tahap analisis data dengan menganalisis melalui pendekatan analisis deskriptif.
3. Tahap ketiga adalah interpretasi data dengan menginterpretasikan hasil nilai-nilai persepsi yang digambarkan dari hasil angket yang dibagikan, kemudian membuat kesimpulan dan saran penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi terhadap kelemahan dan masalah sistem pembayaran PBB yang telah berjalan, serta dan membagikan angket. Angket diberikan langsung kepada warga atau wajib pajak PBB Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pejabat terkait yang berwenang.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak PBB yang terdaftar di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tahun 2017. Teknik penarikan sampel menggunakan *accidental* sampling dimana penetapan sampel dengan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang bertujuan memberikan informasi yang maksimal. Purposive sampling di sini menggunakan judgement sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Berikut ini adalah kriteria penarikan sampel:

1. Wajib Pajak PBB yang terdaftar di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tahun 2017.
2. Aktif atau pernah membayar Pajak PBB pada periode sebelumnya.

Setelah dilakukan metode *accidental* sampling maka diperoleh sampel sebanyak 50 wajib pajak PBB yang terdaftar di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai.

E. Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definis Variabel	Indikator	Skala
Independent	Kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB	Persepsi Wajib Pajak PBB akan pentingnya Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pembayaran PBB	1. Lebih Cepat dan Tepat Waktu. 2. Peningkatan Penyelesaian Administrasi PBB 3. Membantu Pembayaran PBB. 4. Meminimalkan tunggakan PBB. 5. Pembayaran Tepat Waktu. 6. Ketepatan Jumlah Bayar. 7. Pemberitahuan sanksi sanksi PBB. 8. Kemudahan Tempat Pembayaran. 9. Peningkatan Pelayanan. 10. Peningkatan Penyuluhan,. 11. Peningkatan Kedadaran Wajib Pajak 12. Kepercayaan Imbalan tidak langsung,. 13. Kesadaran PBB sebagai Sumber APBD. 14. Peningkatan Pengetahuan Penggunaan PBB. 15. Pendaftaran PBB, 16. Perhitungan tarif PBB. 17. Jatuh Tempo PBB.	Interval

F. Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan pengumpulan data, maka tahap awal dibutuhkan adalah melakukan kualitas data yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, karena butir pernyataan sebelum digunakan harus teruji valid. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif, dan kemudian dibuat kesimpulan hasil penelitian

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tahun 2017. Kuesioner yang disebar ke pegawai dan warga Kantor Lurah Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. sebanyak 50 kuesioner. Dari 50 kuesioner yang disebar, terdapat 35 kuesioner (70%) yang dikembalikan. Seluruh kuesioner yang kembali kemudian diperiksa kelengkapan pengisiannya, dan seluruhnya dapat diolah karena terisi dengan lengkap oleh responden. Hasil penelitian ini akan dijabarkan sesuai dengan teknik analisis data yang telah ditetapkan, yaitu analisis deskriptif.

Adapun rincian jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel. 4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	50
2	Kuesioner yang dikembalikan	35
3	Kuisioner yang diisi dengan lengkap	35
4	Tingkat Pengembalian	70%

1. Uji Kualitas Data

Untuk menyatakan tingkat keabsahan suatu data dilakukan dengan cara membandingkan nilai *Correction Item Total Correlation* dengan nilai r tabel. Jika

nilai *Correction Item Total Correlation* > r tabel, maka data tersebut dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas nilai *Cronbach's Alpha if item deleted* > 0,70 maka variabel dinyatakan reliabel, (Situmorang, et. al., 2014:89).

a. Uji Validitas

Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
BP1	62.09	63.845	.559	.934
BP2	62.09	63.257	.786	.929
BP3	62.09	62.845	.829	.928
BP4	62.09	63.610	.816	.929
BP5	62.03	64.264	.691	.931
BP6	61.97	61.793	.843	.927
BP7	61.97	62.617	.764	.929
BP8	62.80	63.988	.473	.938
BP9	62.14	65.655	.464	.936
BP10	62.40	64.012	.598	.933
BP11	62.31	63.575	.782	.929
BP12	62.31	64.281	.774	.930
BP13	62.06	62.879	.799	.929
BP14	62.40	65.365	.479	.936
BP15	62.60	63.541	.640	.932
BP16	62.49	64.139	.566	.934
BP17	62.46	63.726	.574	.934

Dari hasil uji validitas yang dilakukan terhadap 35 responden mahasiswa perpajakan pada Universitas Pembangunan Panca Budi, nilai r tabel untuk sampel = 35 dengan $\alpha = 5\%$ adalah 0,3338, dan hasil uji validitas pada tabel 4.5. Untuk nilai *Correction Item Total Correlation* setiap item Butir Pernyataan (BP) lebih besar dari 0,3338, maka seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid.

b. Uji Realibilitas

Dari seluruh butir pernyataan yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid, maka selanjutnya diuji realibilitasnya. Berdasarkan Tabel 4.5. hasil pengujian nilai *Cronbach's Alpha if item deleted* seluruhnya berada di atas 0,70, maka berdasarkan hasil analisis tersebut seluruh Butir Pernyataan dinyatakan reliabel.

2. Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak Lurah, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berikut dibuat tabel *Problem Statement Matrix* untuk menggambarkan secara ringkas kendala yang dihadapi dalam proses administrasi pembayaran PBB. Adapun hasil *Problem Statement Matrix* disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.3 Problem Statemen Matrix Pembayaran PBB Kelurahan Datuk Bandar, Kecamatan Pantai Johor, Kota Tanjung Balai.

Permasalahan	Proses penyampaian penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Masih menggunakan sistem manual yang kurang efisien dan memiliki banyak kekurangan. Tidak tersedia <i>database</i> yang <i>update</i> wajib pajak PBB atas pembayaran kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.
Efeknya	Proses Pemantauan Pembayaran
Akibatnya	Sulit Untuk Melakukan Pemantaun Pembayaran PBB
Solusinya	Merancang Sebuah Sistem Informasi Pemantauan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Website yang memiliki <i>database</i> tersendiri di Kantor Lurah Datuk Bandar, yang terintegrasi dengan setiap tempat pembayaran sehingga akan mudah melakukan pemantauan.

Adapun hasil pengumpulan kuesioner dari responden yang diperoleh akan dijelaskan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.4 Pernyataan 1, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan penyelesaian tugas- tugas administrasi Pajak PBB lebih cepat dan tepat waktu.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2.9	2.9	2.9
	Netral	4	11.4	11.4	14.3
	Setuju	21	60.0	60.0	74.3
	Sangat Setuju	9	25.7	25.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan tabel 4.4, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 9 orang (25,7%), Setuju sebanyak 21 orang (60,0%), Netral 4 orang (11,4%), Sangat Tidak Setuju 1 orang (2,9%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 21 orang (60,0%). Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 85,7% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan penyelesaian tugas- tugas administrasi Pajak PBB lebih cepat dan tepat waktu.

Tabel 4.5 Pernyataan 2, Dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan Banyaknya tugas administrasi PBB yang saya selesaikan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	6	17.1	17.1	17.1
	Setuju	21	60.0	60.0	77.1
	Sangat Setuju	8	22.9	22.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 8 orang (22,9%), Setuju sebanyak 21 orang (60,0%), Netral 6 orang (17,1%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 21 orang (60,0%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 29 orang atau setara 82,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 82,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan Banyaknya tugas administrasi PBB yang saya selesaikan.

Tabel 4.6. Pernyataan 3, Pelayanan bagian administrasi PBB melalui Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB merupakan bantuan yang penting, dan sangat berharga dalam menyelesaikan pembayaran PBB.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	6	17.1	17.1	17.1
	Setuju	21	60.0	60.0	77.1
	Sangat Setuju	8	22.9	22.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 8 orang (22,9%), Setuju sebanyak 21 orang (60,0%), Netral 6 orang (17,1%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 21 orang (60,0%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 29 orang atau setara 82,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 82,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Pelayanan bagian administrasi PBB melalui Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB merupakan bantuan yang penting, dan sangat berharga dalam menyelesaikan pembayaran PBB.

Tabel 4.7. Pernyataan 4, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB dapat meminimalkan tunggakan PBB.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	5	14.3	14.3	14.3
	Setuju	23	65.7	65.7	80.0
	Sangat Setuju	7	20.0	20.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 7 orang (20,0%), Setuju sebanyak 23 orang (65,7%), Netral 5 orang (14,3%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 23 orang (65,7%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 30 orang atau setara 85,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 85,7% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB dapat meminimalkan tunggakan PBB.

Tabel 4.8. Pernyataan 5, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB Membuat Pembayaran PBB Tepat Waktu Sebelum Tanggal Jatuh Tempo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	5	14.3	14.3	14.3
	Setuju	21	60.0	60.0	74.3
	Sangat Setuju	9	25.7	25.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.8, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 9 orang (25,7%), Setuju sebanyak 21 orang (60,0%), Netral 5 orang (14,3%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 21 orang (60,0%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 30 orang atau setara 85,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 85,7% responden Setuju dan Sangat

Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB Membuat Pembayaran PBB Tepat Waktu Sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

Tabel 4.9. Pernyataan 6, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB membuat pembayaran PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	6	17.1	17.1	17.1
	Setuju	17	48.6	48.6	65.7
	Sangat Setuju	12	34.3	34.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.9, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 12 orang (34,3%), Setuju sebanyak 17 orang (48,6%), Netral 6 orang (17,1%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 17 orang (48,6%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 29 orang atau setara 82,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 82,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB membuat pembayaran PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.

Tabel 4.10. Pernyataan 7, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB Akan Memberikan Informasi Sanksi-Sanksi PBB Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	6	17.1	17.1	17.1
	Setuju	17	48.6	48.6	65.7
	Sangat Setuju	12	34.3	34.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.10, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 12 orang (34,3%), Setuju sebanyak 17 orang (48,6%), Netral 6 orang (17,1%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 17 orang (48,6%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 29 orang atau setara 82,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 82,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB Akan Memberikan Informasi Sanksi-Sanksi PBB Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.

Tabel 4.11. Pernyataan 8, Tempat- Tempat Pembayaran PBB di Kelurahan Pantai Johor, Kec. Datuk Bandar, Tanjung Balai Sudah Sangat Mudah Dijangkau.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	20.0	20.0	20.0
	Netral	12	34.3	34.3	54.3
	Setuju	13	37.1	37.1	91.4
	Sangat Setuju	3	8.6	8.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 3 orang (8,6%), Setuju sebanyak 13 orang (37,1%), Netral 12 orang (34,3%), dan Tidak Setuju sebanyak 7 orang (20,0%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 13 orang (37,1%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 16 orang atau setara 45,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 45,7% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Tempat- Tempat Pembayaran PBB di Kelurahan Pantai Johor, Kec. Datuk Bandar, Tanjung Balai Sudah Sangat Mudah Dijangkau.

Tabel 4.12. Pernyataan 9, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB Akan Meningkatkan Pelayanan Yang Diberikan Oleh Petugas Penerima Pembayaran Di Tempat-Tempat Pembayaran PBB Menjadi Lebih Baik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	5.7	5.7	5.7
	Netral	3	8.6	8.6	14.3
	Setuju	23	65.7	65.7	80.0
	Sangat Setuju	7	20.0	20.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.12, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 7 orang (20,0%), Setuju sebanyak 23 orang (65,7%), Netral 3 orang (8,6%), dan Tidak Setuju sebanyak 2 orang (5,7%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 23 orang (65,7%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 30 orang atau setara 85,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 85,7% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB Akan Meningkatkan Pelayanan Yang Diberikan Oleh Petugas Penerima Pembayaran Di Tempat-Tempat Pembayaran PBB Menjadi Lebih Baik.

Tabel 4.13. Pernyataan 10, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan intensitas Petugas pajak memberikan penyuluhan pajak PBB yang menambah pemahaman saya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.9	2.9	2.9
	Netral	12	34.3	34.3	37.1
	Setuju	17	48.6	48.6	85.7
	Sangat Setuju	5	14.3	14.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.13, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 5 orang (14,3%), Setuju sebanyak 12 orang (48,6%), Netral 12 orang (34,3%), dan Tidak Setuju sebanyak 1 orang (2,9%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 17 orang (48,6%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 22 orang atau setara 62,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 62,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan intensitas Petugas pajak memberikan penyuluhan pajak PBB yang menambah pemahaman wajib pajak.

Tabel 4.14. Pernyataan 11, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan kesadaran membayar pajak yang merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	10	28.6	28.6	28.6
	Setuju	21	60.0	60.0	88.6
	Sangat Setuju	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.14, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 4 orang (11,4%), Setuju sebanyak 21 orang (60,0%), Netral 10 orang (28,6%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 21 orang (60,0%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 25 orang atau setara 72,4%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 72,4% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan kesadaran membayar pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebagai warga negara yang baik.

Tabel 4.15. Pernyataan 12, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan keyakinan saya bahwa hasil pemungutan pajak akan kembali pada masyarakat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	9	25.7	25.7	25.7
	Setuju	23	65.7	65.7	91.4
	Sangat Setuju	3	8.6	8.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.15, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 3 orang (8,6%), Setuju sebanyak 23 orang (65,7%), Netral 9 orang (25,7%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 23 orang (66,7%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 26 orang atau setara 82,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 82,3% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa hasil pemungutan pajak akan kembali pada masyarakat.

Tabel 4.15. Pernyataan 13, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan kesadaran saya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dipergunakan sebagai pendapatan daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	6	17.1	17.1	17.1
	Setuju	20	57.1	57.1	74.3
	Sangat Setuju	9	25.7	25.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.15, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 9 orang (25,7%), Setuju sebanyak 20 orang (65,7%), Netral 6 orang (17,1%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 20 orang (57,1%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 29 orang atau setara 82,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 82,8%. responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dipergunakan sebagai pendapatan daerah.

Tabel 4.16. Pernyataan 14, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan pengetahuan Saya bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	15	42.9	42.9	42.9
	Setuju	14	40.0	40.0	82.9
	Sangat Setuju	6	17.1	17.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.16, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 6 orang (17,1%), Setuju sebanyak 14 orang (40,0%), Netral 15 orang (42,9%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Netral sebanyak 15 orang (42,9%), tetapi secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 20 orang atau setara 57,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 57,1% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan pengetahuan Saya bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum.

Tabel 4.17. Pernyataan 15, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan pengetahuan Saya tentang cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak PBB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2.9	2.9	2.9
	Tidak Setuju	1	2.9	2.9	5.7
	Netral	12	34.3	34.3	40.0
	Setuju	20	57.1	57.1	97.1
	Sangat Setuju	1	2.9	2.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.17, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 1 orang (2,9%), Setuju sebanyak 20 orang (57,1%), Netral 12 orang (34,3%), Tidak Setuju 1 orang (2,9%), dan Sangat Tidak Setuju 1 orang (2,9%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 20 orang (57,1%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 21 orang atau setara 60,0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 60,0% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak PBB.

Tabel 4.18. Pernyataan 16, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan memberikan informasi kepada Saya tentang tarif PBB yang akan saya bayar.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2.9	2.9	2.9
	Netral	12	34.3	34.3	37.1
	Setuju	19	54.3	54.3	91.4
	Sangat Setuju	3	8.6	8.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.18, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 3 orang (8,6%), Setuju sebanyak 19 orang (54,3%), Netral 12 orang (34,3%), dan Sangat Tidak Setuju 1 orang (2,9%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 19 orang (54,3%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 22 orang atau setara 62,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 62,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan memberikan informasi kepada wajib pajak tentang tarif PBB yang akan saya bayar.

Tabel 4.19 Pernyataan 17, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan memberikan informasi kepada Saya tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PBB dan pembayarannya tidak boleh melewati tanggal tersebut agar tidak didenda.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2.9	2.9	2.9
	Netral	12	34.3	34.3	37.1
	Setuju	18	51.4	51.4	88.6
	Sangat Setuju	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.19, hasil analisis menunjukkan responden yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 4 orang (11,4%), Setuju sebanyak 18 orang (51,4%), Netral 12 orang (34,3%), dan Sangat Tidak Setuju 1 orang (2,9%). Dari jawaban responden paling banyak adalah menyatakan Setuju sebanyak 18 orang (51,4%), dan secara akumulasi yang menyatakan setuju ditambah sangat setuju adalah 22 orang atau setara 62,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara akumulasi 62,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan memberikan informasi kepada wajib pajak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PBB dan pembayarannya tidak boleh melewati tanggal tersebut agar tidak didenda.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam penagihan pajak masih kurang efisien karena masiah menggunakan sistem manual, sehingga harus dirancang sistem informasi pemantauan pembayaran PBB yang berbasis website yang memiliki *database* tersendiri di Kantor Lurah Datuk Bandar, yang terintegrasi dengan setiap tempat pembayaran sehingga akan mudah melakukan pemantauan.

Untuk mengetahui seberapa perlunya/*urgensi* sistem informasi pemantauan pembayaran PBB dibangun, maka perlu dilakukan identifikasi persepsi *user* sistem tersebut dan wajib pajak PBB di Kantor Lurah Datuk Bandar.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah disajikan pada hasil penelitian, maka dapat dinyatakan bahwa :

1. secara akumulasi 85,7% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan penyelesaian tugas- tugas administrasi Pajak PBB lebih cepat dan tepat waktu.
2. secara akumulasi 82,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan Banyaknya tugas administrasi PBB yang saya selesaikan.
3. secara akumulasi 82,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Pelayanan bagian adminstrasi PBB melalui Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB merupakan bantuan yang penting, dan sangat berharga dalam menyelesaikan pembayaran PBB.
4. secara akumulasi 85,7% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB dapat meminimalkan tunggakan PBB.
5. secara akumulasi 85,7% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB Membuat Pembayaran PBB Tepat Waktu Sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
6. secara akumulasi 82,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB membuat pembayaran PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.
7. secara akumulasi 82,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB Akan Memberikan Informasi Sanksi-Sanksi PBB Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.
8. secara akumulasi 45,7% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Tempat-Tempat Pembayaran PBB di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai Sudah Sangat Mudah Dijangkau.
9. secara akumulasi 85,7% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB Akan Meningkatkan Pelayanan Yang Diberikan Oleh Petugas Penerima Pembayaran Di Tempat-Tempat Pembayaran PBB Menjadi Lebih Baik.
10. secara akumulasi 62,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan intensitas Petugas pajak memberikan penyuluhan pajak PBB yang menambah pemahaman wajib pajak.
11. secara akumulasi 72,4% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan kesadaran membayar pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebagai warga negara yang baik.
12. secara akumulasi 82,3% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa hasil pemungutan pajak akan kembali pada masyarakat
13. secara akumulasi 82,8%. responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan kesadaran wajib

pajak bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dipergunakan sebagai pendapatan daerah.

14. secara akumulasi 57,1% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan pengetahuan Saya bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum.
15. secara akumulasi 60,0% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak PBB.
16. secara akumulasi 62,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan memberikan informasi kepada wajib pajak tentang tarif PBB yang akan saya bayar.
17. secara akumulasi 62,9% responden Setuju dan Sangat Setuju bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemantauan PBB akan memberikan informasi kepada wajib pajak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PBB dan pembayarannya tidak boleh melewati tanggal tersebut agar tidak didenda.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum bahwa secara umum masyarakat dilingkungan Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai setuju terhadap pembangunan Sistem Informasi Pemantauan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perbedaan rata-rata Pelaporan SPT masa Sebelum dan Sesudah PP 46 secara signifikan, sehingga dapat diartikan Penerapan PP 46 Tahun 2013 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan yang signifikan bagi wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
2. Terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah PP 46 secara signifikan, sehingga dapat diartikan Penerapan PP 46 Tahun 2013 memberikan peningkatan jumlah wajib pajak yang signifikan pada KPP Pratama Binjai.
3. Rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah PP 46 berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa Penerapan PP 46 memberikan peningkatan kontribusi penerimaan pajak penghasilan yang signifikan pada KPP Pratama Binjai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut ini adalah saran dalam penelitian ini:

1. Untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan kepada Fiskus/pegawai pajak khususnya apakah terjadi efisiensi biaya yang dihemat oleh kantor pajak dalam penerapan kebijakan ini.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak lebih besar perlu dilakukan literasi pajak masyarakat secara konsisten, khususnya pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu diperluas populasi dan sampel penelitian, khususnya waktu pengamatan atau periode tahun fiskal pajak lebih diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. (2011). *Perpajakan Indonesia, Lentera Imlu Cendikia*. Jakarta.
- Resmi, Siti (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rusiadi, et al. (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel. Cetakan Pertama*. Medan: USU Press.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 28 Tahun. (2007). Tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 17 Tahun. (2007). Tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Subekti R. Tobias dan Asrori, (2003). *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Situmorang, S. H., Lufti, M. (2014). *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat.